

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021 mencerminkan perubahan arah kebijakan luar negeri AS yang signifikan, sebagaimana terlihat melalui tiga dimensi dalam teori James N. Rosenau: *orientations, commitments, dan behaviors*. Pada dimensi *orientations*, kebijakan ini menunjukkan pergeseran persepsi strategis pemerintahan Joe Biden, orientasi nilai seperti penekanan terhadap hak asasi manusia dan diplomasi, serta persepsi bahwa keterlibatan militer tidak lagi efektif dalam mencapai kepentingan nasional. Pada dimensi *commitments*, konsistensi Biden dalam menjalankan jadwal penarikan pasukan sesuai Perjanjian Doha tanpa melakukan negosiasi ulang mencerminkan komitmen politik yang kuat terhadap agenda domestik dan janji kampanye. Sementara pada dimensi *behaviors*, keputusan tersebut diwujudkan melalui aksi nyata berupa penarikan total pasukan dari Afghanistan, yang menjadi manifestasi reposisi kebijakan global AS dari pendekatan militeristik ke arah diplomasi dan efisiensi sumber daya. Dampak langsung dari keputusan ini adalah runtuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat serta kembalinya Taliban ke tumpuk kekuasaan. Secara global, kebijakan ini memunculkan beragam respons, yang dipengaruhi oleh kepentingan strategis, kemanan Nasional, nilai ideologis, serta pertimbangan kemanusiaan.

Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan bahwa keputusan penarikan pasukan tersebut merupakan hasil dari dinamika kompleks yang dapat dijelaskan melalui empat variabel utama dalam teori kebijakan luar negeri Rosenau: *idiosyncratic factors, societal sources, governmental sources, dan systemic variables*. Faktor idiosinkratik tercermin dari karakter dan nilai-nilai pribadi Presiden Joe Biden yang sejak lama menunjukkan penolakan terhadap keterlibatan militer jangka panjang, sebagaimana terlihat dari pengalamannya sebagai Senator dan Wakil Presiden. Faktor *societal* atau sosial termanifestasi dalam tekanan opini publik dan media massa yang mayoritas menuntut diakhirinya keterlibatan AS

dalam perang yang dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional. Adapun *governmental sources* tampak dari peran lembaga-lembaga formal seperti Kongres, Departemen Pertahanan, dan Office of Management and Budget (OMB) yang memberikan dukungan administratif, teknis, dan fiskals secara legal dan terkoordinasi.

Terakhir, pada tingkat sistemik (internasional), kebijakan penarikan pasukan AS dari Afghanistan juga dipengaruhi oleh dinamika global yang tengah berubah, termasuk meningkatnya perhatian strategis terhadap kawasan Indo-Pasifik dan kompetisi geopolitik dengan Tiongkok. Di samping itu, pandemi COVID-19 telah mendorong perlunya realokasi sumber daya nasional untuk memperkuat keamanan domestik dan mempercepat pemulihhan ekonomi. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa keputusan penarikan pasukan tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan militer, melainkan merupakan hasil dari kombinasi faktor individual, sosial, institusional, dan internasional yang kompleks.

Dalam kerangka kepentingan nasional sebagaimana dijelaskan oleh James N. Rosenau yakni sebagai alat analisis arah kebijakan luar negeri sekaligus sebagai justifikasi politik atas tindakan negara kebijakan ini mencerminkan rasionalisasi strategi Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik berkepanjangan, mengurangi beban anggaran militer, dan mengalihkan fokus ke isu-isu domestik serta tantangan global baru. Secara politis, langkah ini juga dijustifikasi sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi rakyat dan mencegah korban jiwa yang lebih besar. Dari sudut pandang realisme klasik Hans Morgenthau, keputusan ini mencerminkan upaya mempertahankan eksistensi dan stabilitas negara, yang menjadi inti dari kepentingan nasional. Dengan demikian, kebijakan penarikan pasukan dari Afghanistan tidak hanya logis secara strategis, tetapi juga sah secara politik dan ideologis bagi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai kebijakan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan pada masa pemerintahan Joe Biden, penulis merumuskan beberapa saran yang diharapkan

dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan studi hubungan internasional serta praktik kebijakan luar negeri.

Pertama, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penting untuk memahami bahwa keputusan penarikan pasukan militer, khususnya dalam konteks intervensi jangka panjang, harus mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Keputusan seperti ini tidak hanya berdampak pada dinamika domestik, tetapi juga memiliki konsekuensi geopolitik dan kemanusiaan yang luas. Oleh karena itu, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri perlu disertai perencanaan transisi yang matang serta strategi diplomatik yang adaptif guna memitigasi dampak negatif pasca-intervensi.

Kedua, bagi akademisi dan peneliti, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperluas kajian terhadap dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara lebih interdisipliner. Teori kebijakan luar negeri Rosenau terbukti relevan dalam memahami proses pengambilan keputusan yang kompleks, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kasus-kasus kebijakan luar negeri serupa di masa mendatang. Penggunaan pendekatan multi-level yang mencakup variabel idiosinkratik, sosial, institusional, dan sistemik perlu terus dikembangkan dalam penelitian-penelitian kebijakan luar negeri kontemporer.

Ketiga, bagi mahasiswa dan pembelajar di bidang hubungan internasional, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi terhadap pentingnya pemahaman teoritis yang mendalam dan penggunaan kerangka konseptual yang tepat dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Penggunaan pendekatan deskriptif-analitis yang dikombinasikan dengan teori kebijakan luar negeri memungkinkan terbangunnya pemahaman yang lebih utuh dan kritis terhadap dinamika politik internasional. Dengan demikian, saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret terhadap pengembangan pengetahuan, praktik kebijakan, serta pembentukan perspektif kritis dalam studi hubungan internasional ke depan.